

Paradigma Tauhid dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Studi pada Ceramah Gus Baha di Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Keuangan

Ibnu Fajri

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Email: ibnufajri@gmail.com

ABSTRAK

The goal of this study is to look into the monotheistic values conveyed by Gus Baha as mufassir in lectures given in government financial management institutions. The data for this study came from a YouTube video of Gus Baha giving a lecture at a government financial management organization. Following a search, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (Kemenkeu RI) and the Indonesian Financial Supervisory Agency of the Republic of Indonesia (BPK RI) provided two films of Gus Baha's study. Discourse analysis research approaches are used in this study. In addition to the dominant and extensively utilized quantitative analysis, discourse analysis is an option to content analysis. According to the findings of this study, BPK RI should be able to follow the monotheistic paradigm, which states that the supervisory institution must be stronger and healthier than the one being overseen. The management of public finances is also based on expertise and experience Kemenkeu RI, in addition to believing that Allah has the final say in everything. The implications of this study are that the Islamic truth conveyed by Gus Baha in relation to the monotheism paradigm in public finance management can be embedded in the hearts of listeners and used as a reference for behavior in the development of state financial managers, in this case the Financial Supervisory Agency and the Ministry of Finance.

Keywords: Monotheistic Paradigm, Public Finance, Gus Baha

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor nilai-nilai Tauhid yang disampaikan oleh Gus Baha selaku mufassir dalam ceramah-ceramah yang dilakukan di instansi-instansi yang berwenang mengelola keuangan publik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari video youtube berupa ceramah yang dilakukan oleh Gus Baha pada instansi pengelola keuangan publik. Setelah dilakukan penelusuran maka diperoleh dua video kajian Gus Baha yaitu di Kementerian Keuangan RI dan Badan Pengawas Keuangan RI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Hasil penelitian ini yaitu BPK diharapkan bisa memegang teguh paradigma

tauhid yaitu Lembaga yang mengawasi harus lebih kuat dan sehat daripada yang diawasi. Kemudian di Kementerian Keuangan, selain berkeyakinan bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu, pengelolaan keuangan publik juga berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Implikasi dari penelitian ini adalah kebenaran Islam yang disampaikan Gus Baha berkaitan dengan paradigma tauhid dalam pengelolaan keuangan publik bisa tertanam di hati pendengarnya serta dapat menjadi bahan acuan perilaku dalam membangun karakter pengelola keuangan negara dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Kementerian Keuangan.

Kata Kunci: Paradigma Tauhid, Keuangan Publik, Gus Baha

Diterima Redaksi: Mei 2022, Selesai Revisi: Juni 2022, diterbitkan: Juni 2022

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v3i1.5371>

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang diridhohi Allah SWT dan merupakan agama terbaik di dunia ini. Islam merupakan satu-satunya agama yang memiliki berbagai macam dimensi, dimana dimensi-dimensi tersebut dapat menjawab berbagai macam persoalan asasi umat manusia sepanjang masa, termasuk masa kini dan masa yang akan datang di setiap tempat dan di masyarakat manapun. Dalam agama islam dikenal dengan adanya sebuah kitab suci yang diturunkan melalui perwakilan umat muslim di dunia ini yaitu Muhammad Bin Abdullah yang merupakan kekasih Allah SWT. Al-Qur'an merupakan *Qalamullah* (Firman Allah) yang diturunkan dengan huruf beserta maknanya di mana Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang membuktikan kebenaran dari apa yang dibawa oleh kekasih Allah. Al-Qur'an disamping menonjolkan aspek-aspek ketuhanan yang harus dicerna oleh manusia, juga terdapat aspek kemanusiaan yang memberikan kebebasan untuk melakukan kreativitas dan aktivitasnya. Hal tersebut nampak dalam karakter Akuntansi yang digambarkan oleh Al-Quran (Burhan, 2016).

Kalau Al-Qur'an berbicara akuntansi bukanlah hal yang aneh karena Allah telah menyatakan beberapa kali bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia, diantaranya terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 2 yang menyatakan bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya serta merupakan petunjuk bagi mereka yang bertaqwa. Sedangkan secara spesifik Al-Qur'an telah berpesan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan adanya pembukuan dalam muamalah (transaksi Akuntansi) hal ini merupakan benang merah yang menghubungkan eksistensi Allah SWT terhadap keseharian manusia sebagai makhluk ciptaannya dalam menjalankan roda perekonomian terkhususnya dalam bidang akuntansi. Maksud dari ayat tersebut adalah membahas masalah muamalah, termasuk di dalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang dan sewa-menyewa. Dari situ dapat disimpulkan bahwa dalam Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanan utamanya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan antara kedua pihak yang memiliki

hubungan muamalah, dalam bahasa akuntansi lebih dikenal dengan *accountability*.

Nabi Muhammad SAW telah menaruh perhatian terhadap akuntansi, perhatian tersebut didasari dengan keinginan membersihkan *muamalah maliah* (keuangan) dari unsur-unsur *riba* dan dari segala bentuk penipuan (ketidakjujuran), pembodohan, pemerasan, dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara *batil*. Perhatian tersebut diwujudkan dengan mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi akuntan dan diberi sebutan khusus *hafazhul al-amwal* (Syahatah, 2001). Berdasarkan argumentasi tersebut, paradigma tauhid dapat dijadikan landasan yang kuat berkaitan dengan akuntansi. Adapun penelitian terdahulu tentang paradigma tauhid yang terkait akuntansi pernah dilakukan oleh As'adiyah (2018) yang memperoleh hasil bahwa paradigma tauhid memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembentukan Sumber Daya Insani *sabiqun bil khairah* melalui *sharia corporate culture*. Paradigma tauhid (X) terhadap pembentukan SDI *sabiqun bil khairah* (Z) dengan *sharia corporate culture* (Y) sebagai variabel intervening.

Dalam kajian akuntansi, dikenal istilah keuangan publik yaitu upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan (Rosen & Gayer, 2008). Kebutuhan akuntansi masa akan datang dan konsep-konsep pemikiran tentang akuntansi dalam penyajian laporan keuangan, akan mengarah pada bentuk laporan keuangan yang berisi tentang tanggung jawab sosial, juga tanggung jawab kepada Tuhan sesuai dengan tuntutan syariah (Edi & Nurhidayat, 2009). Menurut Meidawati (1998), konsep Islam dan hakekat akuntansi mempunyai persamaan yang searah dan telah terbuka bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andil dalam perkembangannya.

Gus Baha (KH. Bahauddin Nursalim) adalah Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia. Tim yang terdiri dari para profesor dan ahli-ahli Al-Quran se-Indonesia seperti Prof. Quraisy Syihab, Prof. Zaini Dahlan dan lain-lain. Gus Baha termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan nonformal dan nongelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan Gus Baha sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Prof. Quraisy Syihab bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufassir, juga sebagai fakih karena penguasaan pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam al-Quran. Setiap kali lajnah menggarap tafsir dan Mushaf al-Quran, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufassir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai fakihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam al-Quran (Nazili, 2022).

Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena selama ini pengelolaan keuangan publik hanya dipandang dari sisi kapitalis saja, padahal keuangan publik ketika dikaji secara mendalam, maka akan ditemukan nilai-nilai tauhid yang tersemat di dalamnya yang dapat menyadarkan kita

bahwa betapa besar pengaruh Tuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. kehidupan keseharian kita Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplor nilai-nilai Tauhid yang disampaikan oleh Gus Baha selaku mufassir dalam ceramah-ceramah yang dilakukan di instansi-instansi yang berwenang mengelola keuangan publik.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keuangan Publik

Menurut Musgrave (1959), keuangan publik merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai unit. Isu-isu penting dalam studi keuangan publik bukanlah persoalan keuangan meskipun berhubungan dengan aspek keuangan, melainkan masalah utama yang berhubungan dengan sumber-sumber riil. Hal ini disebabkan pula akibat fokus subyek ini yang kadang-kadang tidak jelas. Jadi, keuangan publik memfokuskan pada kajian bagaimana cara pemerintah dalam melakukan alokasi sumber-sumber dan distribusi pendapatan.

Keuangan publik merupakan studi tentang intervensi pemerintah dalam mengatur pasar. Di negara-negara “Anglo Saxon”, keuangan publik atau keuangan negara sebagai ilmu dipandang sebagai cabang ilmu ekonomi, sedangkan di daratan Eropa, keuangan negara dipandang sebagai suatu cabang ilmu politik (Arjsad dkk, 1992). Di Indonesia, ada beberapa kasus tentang pengelolaan keuangan publik selama tahun 2019 yang diungkap oleh Ketua Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Agung Firman Sampurna khususnya dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP). Diantaranya:

Tabel 1. Temuan Kasus Pengelolaan Keuangan Publik oleh BPK RI

No	Temuan Kasus
1.	Kelemahan sistem pengendalian internal dan kepatuhan tersebut meliputi kelemahan dalam penatausahaan Piutang Perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.
2.	Kewajiban Pemerintah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) belum diukur/diestimasi.
3.	Pengendalian atas pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama dan Aset yang berasal dari pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia belum memadai.
4.	Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi.
5.	Penyajian aset yang berasal dari realisasi Belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp 44,20 Triliun pada 34 K/L tidak seragam, serta terdapat penatausahaan dan pertanggungjawaban realisasi belanja dengan tujuan untuk diserahkan kepada masyarakat yang tidak sesuai ketentuan.
6.	Penyaluran dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) Tahun 2016 hingga 2019 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan karena identitas Pekebun penerima dana PPKS belum seluruhnya valid dan adanya dana PPKS yang belum dipertanggungjawabkan.
7.	Skema pengalokasian anggaran Untuk Pengadaan Tanah Proyek Strategis Nasional pada Pos Pembiayaan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun

2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Investasi Tanah PSN untuk kepentingan umum tidak sesuai dengan PP Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.

8. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan program/kegiatan dengan tahun penganggaran atas kompensasi Bahan Bakar Minyak dan listrik.
-

(Sumber: *economy.okezone.com*)

Keuangan publik dalam konteks syariah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam bermuamalah, khususnya dalam relasi negara-rakyat. Dalam arti, hubungan manusia dengan manusia yang lain memiliki ruang yang bebas, namun hubungan ini memiliki nilai transenden sebagai bentuk kegiatan ekonomi yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Jadi, kebebasan manusia, realitas ekonomi, dan akuntabilitas kepada Allah menjadi kerangka kerja bagi para pelaku ekonomi, termasuk penguasa, sehingga kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari bagaimana niat dan tujuan bisnis. Realitas inilah yang mendasari aktivitas ekonomi harus dikonsepsikan dari epistemologi tauhid (Choudhury, 1993).

Tauhid

Tauhid adalah seorang hamba meyakini bahwa Allah SWT adalah Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam rububiyah (ketuhanan), uluhiyah (ibadah), Asma` dan Sifat-Nya. Menurut Syaikh Yahya (2008), tauhid terbagi menjadi tiga yaitu Tauhid Rububiyah (Keesaan Allah dalam ketuhanan-Nya), Tauhid Uluhiyah (Keesaan Allah dalam peribadatan), Tauhid Asma' was-Sifat (Keesaan Allah dalam asma' dan sifat-Nya)

Tauhid Rububiyah yaitu hendaknya seorang hamba meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang Esa, yang menciptakan, memberi rizki dan mengatur alam dengan sendirian. Kemudian yang kedua yaitu Tauhid Uluhiyah. Tauhid ini disebut juga Tauhid Ibadah. Umat Islam dituntut memahami pengertian dan tuntutan Tauhid al-Uluhiyyah yang merupakan agenda dakwah Nabi Muhammad SAW dan juga merupakan agenda para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW yang berorientasikan seruan mengajak umat manusia beriman kepada Allah. Terakhir Tauhid Asm' wa Sifat yaitu meyakini secara mutlak akan keesaan Allah dengan segala kesempurnaan-Nya dan dengan sifat-sifat-Nya yang agung.

Hakekat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah SWT, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selainNya tanpa sebab atau perantara. Seseorang melihat yang baik dan buruk, yang berguna dan berbahaya, semuanya berasal dari SWT. Seseorang menyembahNya dengan ibadah yang mengesakanNya dengan ibadah itu dan tidak menyembah kepada yang lain (Mustaffa & Ahmad, 2011).

METODE PENELITIAN

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari video youtube berupa ceramah yang dilakukan oleh Gus Baha pada instansi pengelola keuangan publik. Selain itu, penelitian ini juga mengambil data pendukung dari tulisan yang telah dipublikasikan berupa artikel jurnal ilmiah, website, buku, skripsi, dan tesis sebagai penguat data penelitian. Setelah dilakukan

penelusuran di YouTube, maka diperoleh dua video kajian Gus Baha yaitu di Kementerian Keuangan RI dan Badan Pengawas Keuangan RI. Adapun tautan video tersebut secara lebih rinci bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Video Kajian Gus Baha

No	Judul Video	Tautan	Kanal Youtube	Tanggal Kajian	Waktu Akses
1	Full Ngaji Gus Baha dengan BPK RI	https://www.youtube.com/watch?v=fV_wN1jig3M&t=2707s	Gus Baha Unofficial	17 September 2020	13 Mei 2022
2	(Live) Ngaji Gus Baha Peringatan Isra' & Mi'raj Kementerian Keuangan	https://www.youtube.com/watch?v=rgpTNM-u_ow&t=21s	Official LP3IA	17 Maret 2021	13 Mei 2022

(Sumber: youtube.com)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Kalau analisa isi kuantitatif lebih menekankan pada pertanyaan “apa” dari pesan atau teks, analisa wacana lebih melihat pada “bagaimana” dari atau teks. Lewat analisis wacana tidak hanya diketahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frase, kalimat, metafora bagaimana suatu berita disampaikan. Dengan mengetahui bagaimana struktur kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersembunyi dari suatu teks.

PEMBAHASAN

Paradigma Tauhid di Badan Pengawas Keuangan

Sebagai Lembaga Pengawasan Eksternal menjadikan BPK sebagai institusi yang berfungsi sangat strategis dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas korupsi, pemeriksaan Pemerintah harus optimal dan dapat menjaga integritas pemerintah agar tidak terjadi penyelewengan dan kecurangan Pemerintah dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan Fungsi pengawasan BPK bertujuan untuk mengefektifkan sistem pengawasan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas KKN. Selain itu masyarakat mengharapkan pengawasan lebih dari sekedar memperbaiki kesalahan melainkan mencegah kesalahan atau penyimpangan terjadi (Armando, 2013). Berkaitan dengan itu, Gus Baha menambahkan bahwa dilihat dari paradigma tauhid, BPK memiliki otoritas dalam *nahi munkar*. Hal tersebut bisa dilihat dari kutipan pernyataan beliau berikut:

“...Itu badan yang disyahkan secara Islam. Memang kita harus bikin aturan yang orang dlohim itu jera. Syukur tidak melalukan kedloliman kembali. Kira-kira analoginya begini seperti BPK, supaya orang tidak menggunakan uang negara seenaknya harus diawasi. Dan yang mengawasi harus yak khudhuhu fauqa yadaihi. Saya mohon BPK juga seperti ini, lembaga yang benar-benar objektif, harus punya kemampuan ditakuti. Apapun kekuatan anda, kalau anda tidak bersih orang tidak akan takut...”

Sebagai *Supreme Audit Institution*, BPK memiliki peran penting dalam mengawal pengelolaan dan peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara. Hasil audit BPK yang dilanjutkan dengan rekomendasi dan diiringi beragam dukungan dari para pemangku kepentingan dari tahun ke tahun berhasil menaikkan kualitas laporan keuangan. Tak hanya pada lembaga pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah (Chrisbiyanto, 2020). Di samping itu, dalam menjalankan otoritasnya, BPK harus objektif serta harus bersih dari sisi internal BPK sendiri. Karena manakala BPK tidak objektif maka tidak ada kewibawaan dalam BPK yang berakibat Lembaga yang diawasi menjadi tidak takut. Imbasnya, Lembaga yang diawasi akan lebih kuat dari BPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Gus Baha menyatakan sebagai berikut:

“... Yang penting di Indonesia masih kita bela secara Islami. Bahwa jangan sampai ketika mengaudit BPK yang takut karena yang diaudit lebih kuat itu jangan sampai. Indonesia harus semua kekuatan untuk menegakkan kebenaran harus lebih kuat ketimbang kebatilan. Ciri kemenangan agama adalah otoritas kebenaran ini punya kekuatan mendikte pada yang bathil jangan sebaliknya...”

Hal ini sejalan dengan Asshiddiqie (2006) yang menyatakan bahwa salah satu fungsi pokok BPK adalah fungsi operatif, yaitu berupa pemeriksaan, pengawasan, dan penyelidikan atas penguasaan, pengurusan, dan pengelolaan kekayaan atas negara. Kemudian berkaitan dengan tauhid, Gus Baha menambahkan dalam pernyataannya berikut:

“...Itu hebatnya Islam, kita bisa nyari-nyari dalil tentang kenapa harus ada BNN harus ada BPK harus ada KPK. Memang Islam pengennya itu ada orang yang soleh punya otoritas yang mengalahkan orang dlohim. Jangan sampai orang dlohim ditakuti orang yang soleh. Begitu seharusnya sampai urusan tauhid...”

Pemeriksaan BPK dilakukan secara Independen, Objektif, dan Profesional. Mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang akan menjadi ukuran pelaksanaan kerjanya. Adapun beberapa unsur pengawasan yang efektif diantaranya adanya unsur keakuratan, Objektif, dan terpusat sebagai indikatornya. Untuk itu, BPK harus senantiasa waspada dalam menjalankan tugasnya. Dalam islam, memang kata waspada identik dengan sikap sangka buruk atau *suudzon*. Namun

dari segi tauhid, Gus Baha mencoba meluruskan hal tersebut dalam sebuah pernyataannya berikut:

“...Saya sudah janji sama Tuhan tidak hanya janji sama BPK tetapi juga janji sama Allah SWT, bahwa umat ini harus banyak istighfar kata saya. Dalam masalah BPK saya sering guyon sama Mas Adib, kamu menjadi pegawai BPK harus banyak istighfar kata saya. Karena bahasa kasarnya karena BPK itu lembaga yang banyak suudlon. Kalau ada bupati kok hidup foya-foya itu pakai uang siapa? Jadi agak dilegalkan suudzon itu. Saya tidak tahu itu waspada atau suudlon...”

Untuk memperkuat argument bahwa waspada itu berbeda dengan suudzon, Gus Baha membuat analogi sebagai berikut:

“... Misal saya bupati punya kekayaan warisan, saya berlibur di Singapura ketemu sama Mas Adib, beliau berhak curiga karena punya otoritas BPK, saya tidak berhak curiga, dia berhak curiga ini sepertinya tidak adil. Saya curiga dengan Mas Adib tidak boleh, Mas Adib curiga dengan saya boleh curiga karena punya otoritas. Ini kan tidak adil sama-sama ke Singapura saya anak orang kaya. Tetapi saya perlu disuudloni karena saya pejabat publik...”

Berdasarkan kutipan-kutipan ceramah Gus Baha di BPK, dapat dipahami bahwa pengawasan dan pemeriksaan BPK terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan publik bertujuan untuk penegakan hukum atas penyimpangan keuangan negara. Walaupun dalam kenyataannya kasus penyimpangan keuangan negara masih banyak ditemui yang mengakibatkan kerugian negara. Menurut Anindita (2019), faktor penyebabnya selain karena korupsi, juga disebabkan karena penyalahgunaan keuangan publik. Hal ini diperkuat dengan temuan dari Illahi & Alia (2017) yang menyatakan bahwa persoalan yang menyangkut lembaga pemerintah yang tidak taat pada ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara mulai pada tataran undang-undang hingga peraturan yang bersifat teknis justru sangat mengkhawatirkan. Akibatnya terdapat temuan indikasi kerugian negara miliaran bahkan triliunan. Faktanya, dapat ditemukan setelah kemarin 4 Oktober 2016, BPK RI menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 di hadapan Presiden dan DPR serta seluruh jajaran kementerian/lembaga. IHPS tersebut merupakan ringkasan dari 696 LHP yang dikodifikasi oleh BPK yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya.

Paradigma Tauhid di Kementerian Keuangan

Tauhid merupakan pegangan yang menentukan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebab tauhid merupakan fondasi bangunan agama yang menjadi dasar setiap amalan hamba-Nya. Tauhid bagi pengelola keuangan publik juga menjadi suatu yang fundamental.

Dalam hal ini ketika tauhid dijadikan fondasi dasar dalam tingkah laku, maka akan kokoh pengelola keuangan publik dalam memegang prinsip tatkala dihadapkan dengan pilihan antara syariah dan non syariah dalam pekerjaannya. Selain dari pada itu memiliki keyakinan bahwa ada makhluk Allah ta'ala yang memiliki tugas untuk mengawasi manusia yaitu malaikat. Sehingga pengelola keuangan publik memiliki sikap profesional dalam bekerja karena keimanan bahwa gerak geriknya senantiasa dalam pantauan para malaikat. Pengelola keuangan publik juga harusnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan pertama dan utama dalam segala aktivitas pekerjaannya (As'adiyah, 2018). Oleh karena itu, Gus Baha sangat menanamkan bahwa ketauhidan harus diatas segalanya dan senantiasa bersemayam di Nurani para pengelola kebijakan publik yaitu pejabat kementerian keuangan. Hal tersebut tercermin dalam kutipan pernyataannya yang ditujukan kepada Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai berikut:

"...Jadi barakahnya pandemi, Bu Menteri kelihatannya hebat, ada pandemi Indonesia kok bisa bertahan. Kalau tidak ada pandemi kan biasa-biasa saja memang normal. Kyai juga begitu ada santri yang kadang nakal itu ujiannya memang begitu kalau tidak ujian tidak keren. Kita hadapi kita ihtiar. Kembali lagi pada contoh cincin dan kertas. Terserah kepada yang punya mau diapakan. Kaya apa dulu kekuatan dinosaurus habis, ayam selemah itu sampai sekarang masih hidup. Apa kita perlu konsultasi sama nyamuk, bagaimana resep kamu kok bisa bertahan resepnya apa. Jawabannya Allah menghendaki nyamuk tetap hidup..."

Selain berkeyakinan bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu, Gus Baha juga mengapresiasi sikap Bu Menteri yang menyatakan bahwa akan menghadapi pandemi Covid-19 dengan pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Hal tersebut juga diperlukan mengingat bukan kali ini saja Indonesia berjuang dalam rangka pemulihan ekonomi. Berikut pernyataan Gus Baha yang mendukung pernyataan Bu Menteri tersebut:

"...Hal-hal ini yang terus menerus mengatakan hasbunallah wanikmal wakil (hanya Allah yang tahu dan hanya Allah semua urusan mencukupi). Tadi kata Bu Menteri kita akan menghadapi dengan pengetahuan dan pengalaman. Saya sangat setuju itu..."

Kuangan publik mempelajari proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, karena setiap keputusan mempunyai pengaruh pada ekonomi dan keuangan rumah tangga dan swasta. Sehingga, penting untuk mengembangkan model-model ekonomi yang membantu menjelaskan arti alokasi sumber daya yang efisien atau optimal, arti keadilan, danantisipasi akibat finansial maupun ekonomi atas suatu keputusan publik. Dengan demikian, fokus keuangan publik adalah mempelajari pendapatan dan belanja pemerintah dan menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi (Digdowiseiso, 2015).

Selain dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, keuangan rumah tangga juga harus memegang teguh logika tauhid. Hal tersebut karena keuangan rumah tangga menjadi sumber keuangan publik. Adanya keinginan yang terlalu tinggi ketika menguasai sumber daya yang berlebih, perlu dievaluasi dengan paradigma tauhid. Gus Baha mencontohkannya dalam sebuah pernyataan berikut:

“...Saya berkali-kali guyon dengan para tamu. Saya punya tamu perempuan tidak cantik miskin lagi ini nyata. Gus doain suami saya supaya kaya. Memang kalau sudah kaya ngapain. Supaya bangun rumah lebih bagus, nanti kamu juga akan dievaluasi kamu akan diganti karena rumahnya mewah, mobilnya mewah ini cocok dihuni wanita cantik dan muda. Akhirnya ibu tersebut bilang tidak jadi saja...”

Dengan demikian, ketika tauhid sudah menjadi pegangan dasar dalam pengelolaan keuangan rumah tangga maka hal tersebut akan meningkatkan sumber-sumber keuangan negara. Sistem pengelolaan keuangan publik yang baik menjadi penting dalam rangka menjamin mutu pengeluaran anggaran serta mengurangi risiko tindak korupsi. Semakin besarnya jumlah sumber daya keuangan publik yang akan dibelanjakan pemerintah, tuntutan perencanaan, penganggaran, dan tata cara pelaksanaan anggaran juga akan semakin besar. Jaelani (2015) menambahkan bahwa modernisasi sistem, proses, dan institusi dalam siklus anggaran juga diperlukan agar mencapai sasaran prioritas program pembangunan pemerintah, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan.

SIMPULAN

Tauhid merupakan pegangan yang menentukan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebab tauhid merupakan fondasi bangunan agama yang menjadi dasar setiap amalan hamba-Nya. Tauhid bagi pengelola keuangan publik juga menjadi suatu yang fundamental. Konsep Islam dan hakekat akuntansi mempunyai persamaan yang searah dan telah terbuka bahwa akuntansi ada dalam Islam dan bahkan memberikan andil dalam perkembangannya. KH. Bahauddin Nursalim atau yang biasa dipanggil Gus Baha adalah salah satu tokoh peradaban Islam di Indonesia yang dikagumi tidak hanya di kalangan pesantren saja namun juga di instansi-instansi pemerintah.

Berdasarkan ceramah Gus Baha di BPK, bahwa sebagai pemegang otoritas pengawasan keuangan publik, BPK diharapkan bisa memegang teguh paradigma tauhid yaitu Lembaga yang mengawasi harus lebih kuat dan sehat daripada yang diawasi. Serta senantiasa meningkatkan kewaspadaan kepada pejabat publik yang terkait pengelolaan keuangan. Kemudian di Kementerian Keuangan, selain berkeyakinan bahwa Allah berkehendak atas segala sesuatu, Gus Baha setuju bahwa pengelolaan keuangan publik juga berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman. Paradigma tauhid juga harus ditanamkan pada pengelolaan keuangan rumah tangga yang menjadi sumber keuangan publik. Implikasi dari penelitian ini adalah kebenaran Islam yang disampaikan Gus Baha berkaitan dengan paradigma tauhid dalam pengelolaan keuangan publik

bisa tertanam di hati pendengarnya serta dapat menjadi bahan acuan perilaku dalam membangun karakter pengelola keuangan negara dalam hal ini Badan Pengawas Keuangan dan Kementerian Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindita, A.T. 2019. *Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Di Kota Makassar*. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Anggraeni, A. 2020. 13 Masalah dalam Laporan Keuangan Pemerintah. <https://economy.okezone.com/read/2020/07/14/320/2246321/ada-13-masalah-dalam-laporan-keuangan-pemerintah-ini-daftarnya?page=1> (Diakses pada 15 Mei 2022).
- Arsjad, N. dkk. 1992. *Keuangan Negara*. Jakarta: Intermedia.
- As'adiyah, A. 2018. Pengaruh Paradigma Tauhid Terhadap Pembentukan Sumber Daya Insani Sabiqun Bi AlKhairah Melalui Sharia Corporate Culture Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (Kspps) Al-Iktisab Pamekasan. Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI).
- Burhan. 2016. *Eksplorasi Nilai-Nilai Tauhid Yang Terkandung Dalam Laporan Keuangan Pt. Bank Muamalat Indonesia Tbk*. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Chrisbiyanto, A. 2020. Audit, Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Negara. <https://nasional.sindonews.com/read/53479/18/audit-akuntabilitas-dan-pengelolaan-keuangan-negara-1590887110>. (Diakses pada 13 Juni 2022)
- Choudhury, M.A. 1993. *The Principles of Islamic Political Economy: A Methodological Enquiry*. London: Macmillan.
- Digdowiseiso, K. 2015. *Sistem Keuangan Publik*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Edi, J. & Nurhidayat. 2009. *Fenomena Ekonomi Syariah Menuntut Akuntan Memahami Prinsip-Prinsip Akuntansi Syariah*. Bandung: Center For Accounting Development Department Of Accounting.
- Illahi, B.K. & Alia, M.I. 2017. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Melalui Kerja Sama BPK dan KPK. *Integritas, Vol. 3, No. 2, Hal. 37-78*
- Jaelani, A. 2015. Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia: Tinjauan Keuangan Publik Islam. *Prosiding International Conference on Islamic Economics and Business (ICONIES) Faculty of Economics, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, 2 – 3 Nopember 2015*.
- Meidawati, N. 1989. Akuntansi Zakat dan Pengelolaannya di Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, Vol. 2, No. 2*.

- Musgrave, R.A. 1959. *The Theory of Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Mustaffa & Ahmad, Z. 2011. Tawhid Uluhiyyah, Rububiyyah dan Al-Asma' Wa Alsifat Menurut Tafsiran Muhammad Rasyid Rida dalam Tafsir Al-Manar. *Jurnal Ushuluddin, Journal 1.indd 49-64*.
- Nazili, M. 2022. *Ceramah Gus Baha Di Berbagai Instansi Pemerintah Bpk Ri, Kemen Keu Ri, Dharma Wanita Kemenag, Pemda Kudus, Rs R Sutrasno Rembang Tahun 2020 Sampai 2021*. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Rosen, H.S. & Gayer, T. 2008. *Public Finance*. New York: McGraw-Hill.
- Syahatah, H. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi Islam*. Jakarta: Akbar Media Sarana: 2001.
- Syaikh Yahya bin Ali al-Hajuri. 2008. *Mengenal Prinsip-Prinsip Dasar Tauhid, Fiqih dan Aqidah*. e-book Raudhah Al Muhibbin.